BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. Fatkhuss Salam,¹ tentang bentuk-bentuk program pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan KUD Sumber Agung Bareng dalam tinjauan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan KUD Sumber Agung Bareng masih belum merata dapat dirasakan oleh semua anggotanya. Selama ini program pemberdayaan tersebut masih dinikmati oleh sebagian anggotanya saja, hal tersebut bisa kita lihat pada unit simpan-pinjam yang hanya memberikan pinjaman pada anggota yang memiliki jaminan (agunan) yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUD Sumber Agung Bareng.

Kaspul Anwar, M. Najib dan Mursidah,² persepsi masyarakat dalam menilai keberadaan KUD Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh 39 responden dalam penelitian ini menunjukkan 76,92% berpersepsi positif terhadap keberadaan KUD Serba Usaha. Masyarakat Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur yang diwakili

---

¹ M. Fatkhuss Salam, 2010. *Bentuk-bentuk program pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan KUD Sumber Agung Bareng dalam tinjauan ekonomi Islam*. Skripsi tidak dipublikasikan

² Kaspul Anwar, M. Najib dan Mursidah, 2011. *Persepsi masyarakat dalam menilai keberadaan KUD Serba Usaha di Desa Kelinjau Ulu Kecamatan MuaraAncalong Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi tidak dipublikasikan

oleh 39 responden dalam penelitian ini juga menunjukkan 71,79% memiliki reaksi mendukung terhadap keberadaan KUD Serba Usaha.

Penelitian Mulyadin,³ “Strategi Koperasi dalam Mengembangkan Usaha”. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan konsep mendiskripsikan kinerja dari unit usaha yang dikembangkan oleh Koperasi Argo Niaga Indonesia (KANINDO) Kabupaten Malang; dan mendiskripsikan strategi pengembangan usaha Koperasi Argo Niaga Indonesia (KANINDO) Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi, dengan hasil penelitian antara lain: Koperasi Argo Niaga Indonesia (KANINDO) Kabupaten Malang merupakan sebuah koperasi yang dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup sehat.

Penelitian Dedy,⁴ Efektifitas dan Kontribusi Pemberian Kredit Perikanan Pada Masyarakat Nelayan di KUD Mina Raharja Puger Kabupaten Jember” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan konsep mendiskripsikan bagaimana efektifitas pemberian kredit perikanan pada masyarakat nelayan di KUD Mina Raharja Puger Kabupaten Jember; bagaimana kontribusi kredit perikanan pada masyarakat perikanan di KUD Mina Raharja Puger Kabupaten Jember. Adapun metode pengumpulan data dengan cara Observasi wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: proses pemberian kredit tidak efektif dan cenderung memanfaatkan saja (aju

---

³ Mulyadin, *Strategi Koperasi dalam Mengembangkan Usaha*, (Malang: FT-UIN Malang), 2007, Skripsi

⁴ Dedy Sugeng Priyadi, *Efektifitas dan Kontribusi Pemberian Kredit Perikanan Pada Masyarakat Nelayan di KUD Mina Raharja Puger Kabupaten Jember*, (Malang: FT-UIN Malang), 2007, Skripsi

mumpung), sedangkan kontribusi yang diperoleh setelah ikut program tersebut juga kurang mengena dalam lingkup pemberdayaan ekonomi, pendidikan maupun diversifikasi usahanya.

Penelitian Agus,⁵ “Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syari’ah BMT Assa’adah Malang”. Dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendiskripsikan konsep pemberdayaan pengusaha kecil serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan BMT Assa’adah Malang adalah mengembangkan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi UKM, serta menjadi penghubung antar UKM dengan Bank. BMT juga mengembangkan kegiatan bisnis yang bertujuan membantu UKM dengan memberikan pembiayaan, karena BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro dengan model kecil. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi

Uraian penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ditempatkan pada pembahasan mengenai Kerja Sama antara Koperasi Unit Desa “DAU” Malang dengan Peternak Sapi Perah dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulisan ini akan membahas lebih fokus pada KUD “DAU” Malang Sebagai Lembaga Pemberdayaan Perekonomian di tingkat Pedesaan dalam Persepektif Ekonomi Islam atau (Fiqih Muamalah).

---

⁵ Agus Nita Diodawati, *Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa’adah Malang*, (Malang: FE-UIN Malang), 2004 Skripsi

B. Kajian Teori

1. Pengertian Koperasi

Prinsip kolektifitas dan ta'awun yang disyariatkan ajaran islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi yang kokoh, yaitu kolektifitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota.⁶

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pengertian koperasi itu sendiri. Secara etimologi koperasi berasal dari kata co dan operation, yang mengandung arti bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 tentang undang-undang perkoperasian, pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang tau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu,

---

⁶ Abdul Basith. *Islam Dan Menejemen Koperasi Prinsip Dan Pengembangan Di Indonesia*. Malang: UIN Press,2008. Hal 41

koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada.⁷

Dari perumusan-perumusan tentang koperasi, dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai dua segi yang terjalin menjadi satu, yaitu:

a. Segi Sosial

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam suatu wadah organisasi berdasarkan kekurangan.

b. Segi Ekonomis untuk kesejahteraan anggota.

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menyelenggarakan suatu usaha dibidang ekonomi.⁸

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang harus dapat mempertinggi taraf kehidupan anggota dan rakyat umumnya. Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi dan peran koperasi tercantum dalam pasal 4 undang-undang No. 25 tahun 1992 perkoperasian yang berbunyi:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

---

⁷ R. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo. 2000, hlm:1

⁸ Bintari A. titin Suprihatin. *Penentuan Pelajaran Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Ganeca Exact. 1988. hal 166

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi tersebut akan tercapai bilamana koperasi benar-benar menjalankan pekerjaannya berdasarkan asas dan sendi dasarnya. Untuk meningkatkan taraf kehidupan anggota-anggota dan rakyat umumnya, kecerdasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat gemar berkoperasi.⁹

3. Jenis-jenis Koperasi

Dalam pasal 16 Undang-undang tentang koperasi No. 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi meliputi:

- a. Koperasi simpan pinjam
- b. Koperasi konsumen.
- c. Koperasi produsen.
- d. Koperasi pemasaran.
- e. Koperasi jasa.

Mengenai penjelasan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut:

- a. Berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

---

⁹ Arifinal Chaniago. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa. 1979. Hal 21

- 1) Koperasi konsumen
- 2) Koperasi kredit
- 3) Koperasi produksi

b. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:

- 1) Koperasi Desa
- 2) Koperasi unit desa
- 3) Koperasi konsumsi
- 4) Koperasi pertanian
- 5) Koperasi peternakan
- 6) Koperasi perikanan
- 7) Koperasi kerajinan/industri
- 8) Koperasi simpan pinjam/koperasi kredit

c. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:

- 1) Koperasi pegawai negeri
- 2) Koperasi angkatan darat
- 3) Koperasi angkatan udarah
- 4) Koperasi angkatan laut
- 5) Koperasi angkatan kepolisian
- 6) Koperasi karyawan

d. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktifitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:

- 1) Koperasi batik
- 2) Bank koperasi
- 3) Koperasi asuransi.¹⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Inpres No. 4 tahun 1973 menyatakan bahwa badan usaha unit desa (BUUD) yang pada dasarnya dibentuk bagi setiap wilayah unit desa adalah sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi peternakan/koperasi desa yang terdapat di dalam wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Inpres No. 2 tahun 1978 KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD, tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta member pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan.¹¹

Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang berlaku.

---

¹⁰ R. T. Susantya Rahardja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000. hal 62

¹¹ Sri Woelan Azis. *Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaanya*. Bandung : Alumni. 1981. hal 14

2. Landasan Operasional

Landasan hukum untuk mengembangkan dan memperkuat peranan BUUD/KUD, dimana KUD benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan di atur oleh warga desa sendiri untuk kepentingan mereka dan pembangunan pedesaan, maka pada tahun 1978 dikeluarkan instruksi presiden RI No. 2 tahun 1978 tentang Badan Unit Desa/ koperasi unit desa. Pengertian landasan koperasi dimaksudkan sebagai suatu dasar pedoman bagi kopeasi, baik dasar bagi setiap pemikiran yang akan menentukan arah dan tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan Negara.

Tindakan dan gerak koperasi berdasarkan pada karakter atau sifat yang terdapat dalam koperasi Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan dalam pasal 2 Bab 11 bagian perta bahwa koperasi berlandasan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Landasan koperasi tersebut juga berlaku bagi koperasi Unit Desa (KUD), seperti yang telah diketahui, bahwa sejarah terbentuknya KUD itu menjadi landasan hukumnya KUD dan pegangan pelaksanaanya KUD.

3. Keanggotaan KUD

Koperasi adalah milik anggota sendiri dibentuk oleh anggota dari anggota dan untuk kepentingan anggota sendiri. Demikian hal nya juga dengan KUD yang dibentuk oleh warga desa sendiri melalui prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang

berlaku. Dalam pasal 16 ayat 1 UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Indonesia yang mampu melaksanakan tindakan hokum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Untuk menjadi anggota KUD harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu oleh yang bersangkutan sebagai maka telah ditetapkan oleh anggaran dasar KUD sesuai dengan ketentuan perundangan perkoperasian yang berlaku. Keanggotaan koperasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya.
- b. Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka.¹²

Keanggotaan koperasi termasuk KUD dapat diperoleh atau diakhiri setelah koperasi KUD telah dipenuhi. Oleh karena itu keanggotaan KUD tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota koperasi tidak dapat mewakilkan kepada siapa siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun, untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawab dan hak-haknya sebagai anggota.

4. Pengembangan dan pembinaan KUD

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan KUD diperlukan suasana yang sehat. Artinya keadaan lingkungan yang mampu KUD berkembang. Demikianpun kalau pada tubuh KUD terdapat bagian yang tidak sehat, maka

---

¹² Abdul Basith, Islam dan, hal 119

harus segera disembuhkan dengan menyingkirkan hambatan-hambatan. KUD sebagai badan usaha ekonomi yang berwatak social mempunyai berbagai segi yang dapat terkena hambatan, seperti halnya kerugian, barang tidak laku, dan sebagainya.

Pengembangan KUD harus dilakukan di seluruh daerah, yang dalam pelaksanaannya secara bertahap dengan berpedoman pada 2 asas sebagai berikut:

- a. Asas selektifitas yaitu bahwa program pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap dan menurut prioritasnya
- b. Asas pemerataan yaitu bahwa program pengembangan harus dapat dikembangkan secara merata dilingkungan masyarakat diseluruh daerah¹³.

Dalam upaya pembinaan KUD perlu dipilih bidang-bidang pembinaanya melalui:¹⁴

- a. Organisasi

Pembinaan organisasi diarahkan untuk tercapainya organisasi ekonomi rakyat yang efektif dan efisien dan dapat menolong dirinya sendiri.

- b. Manajemen

Koperasi memiliki watak dan corak management sendiri, dimana watak dan corak manajemen KUD yang merupakan karakteristiknya adalah keterbukaan dan kewirakoperasian.

- c. Usaha

Usaha KUD diarahkan pada kemampuan KUD untuk menjadi koperasi desa yang serba usaha, dengan jalan menampung segala kegiatan

¹³ Sri Woelan. Aspek-aspek. Hlm; 148

¹⁴ Ibid: 149

ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang menjadi pokok pencahariannya.

d. Permodalan

Setiap bentuk usaha yang bergerak dibidang perekonomian selalu memerlukan modal. Pada dewasa ini KUD-KUD yang ada masih belum banyak yang mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah kerjanya.

e. Efek usaha

KUD dikatakan berhasil, apabila anggota dan masyarakat lingkungan kerja KUD tersebut merasakan manfaat dan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan dengan adanya KUD tersebut.

D. Pemberdayaan Ekonomi

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.¹⁵

---

¹⁵ Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*, Bandung: ISTECS, 2001, hlm. 28

Peremberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.¹⁶

Sedangkan untuk membahas ekonomi masyarakat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi. Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang.¹⁷ Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada *Oxford Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip Muhammad dan Alimin dalam *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia.¹⁸ Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material.

---

¹⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 263-264

¹⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 5.

¹⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, hlm. 12

Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi masyarakat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Karena pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi perekonomian masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik. Hal ini berarti menyangkut usaha-usaha pertumbuhan modal, tenaga kerja berkualitas, kesempatan kerja dan pertumbuhan teknologi baik bersifat fisik maupun non fisik.

Sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di pedesaan, yang mata pencariannya bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, maka untuk itu pembangunan ekonomi petani pedesaan harus terarah pada upaya pemberdayaan. Menyadari realitas yang ada pada pemberdayaan perekonomian pedesaan sangat dibutuhkan. Proses pemberdayaan perekonomian masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat baik sumberdaya yang berasal dari alam maupun sumber daya manusianya. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat.

Ketidak berdayaan ekonomi masyarakat dapat dirumuskan sebagai keadaan dari masyarakat yang hidupnya serba kekurangan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Adapun factor-faktor yang menyebabkan ketidak berdayaan perekonomian masyarakat antara lain:

- 1) Rendahnya kapasitas dan keterbatasan sumber daya alam bagi proses produk primer dll.
- 2) Keterbatasan informasi, pembinaan, fasilitas permodalan, proteksi usaha dan kesempatan merupakan suatu lingkungan yang lazim dalam bisnis modern
- 3) Keterbatasan lapangan kerja dan lapangan usaha disektor pertanian baik akibat dari keterbatasan lahan pertanian maupun sebagai akibat ketertamparan akibat masuknya input modern
- 4) Keterbatasan alternative pilihan teknologi budi daya untuk komoditi pertanian dan peternakan yang ekonomis.
- 5) Rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin yang pada kenyataannya sangat berhubungan erat dengan:
  - a. Masalah pendapatan yang diperoleh.
  - b. Masalah gizi dan pangan
  - c. Masalah kesehatan
  - d. Masalah lingkungan dan pemukiman
  - e. Masalah pendidikan

Selama ini pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan dalam upayanya untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Pemerintah juga mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi masyarakat untuk padat meneglolah kegiatan usah ekonomi secara kompetitif dan menguntungkan yang dapat memberikan lapangan kerja dan pendapatan yang layak berkelanjutan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat oleh pemerintah harus diiringi kesadaran masyarakat untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga meningkatkan taraf hidupnya.¹⁹

---

¹⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 264

E. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Pada hakikatnya kerjasama dapat dimaknai sebagai adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian ini maka terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. apabila satu dari ketiga unsur dimaksud tidak termuat dalam objek yang dikaji maka dapat dianggap bahwa objek tersebut tidak terdapat kerjasama.²⁰

Selanjutnya oleh Ramses dan Bowo dijelaskan pula bahwa unsur dua pihak atau lebih, selalu menggambarkan dua himpunan dari kepentingan-kepentingan yang satu sama lain saling mempengaruhi, sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting untuk dilakukan. Jika hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan itu bukanlah hubungan kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak, dan pada saat yang bersamaan merugikan pihak-pihak lain, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama selalu menempatkan posisi yang seimbang, serasi, dan selaras.

Rendal dan Yablonsky juga mengemukakan bahwa kerjasama hanya dapat berhasil apabila:²¹

---

²⁰ Andy Ramses, dan Fauzi Bowo, 2007. *Kerjasama Antar Daerah Format Pengaturan dan Pengorganisasian*. dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi:25

- a. Dimulai dengan membangun suatu dasar yang kuat untuk bekerjasama. Hal ini dapat diwujudkan dengan: (1) bersikap inklusif. Kerjasama biasanya diinisiasi oleh beberapa orang kunci atau kelompok. Namun adalah sangat penting melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau pemangku kepentingan. Keterlibatan ini akan mendorong semangat untuk berkomitmen mensukseskan kerjasama tersebut karena pihak yang terlibat merasa turut mengikuti rencana kerja tersebut. Sebaliknya sikap eksklusif yaitu hanya melibatkan orang atau kelompok tertentu saja akan mendatangkan resistensi karena ada rasa saling curiga dan tidak saling percaya. Kata pendeknya, program kerjasama akan menjadi baik dan sukses apabila diikutsertakan atau dilibatkan sejak awal. (2) libatkan elite yang dipilih rakyat (elected officials). Perlu diperhatikan untuk melibatkan wakil rakyat atau pejabat yang dipilih rakyat sejak awal karena posisi mereka sangat menentukan. Mereka dapat mempengaruhi keputusan khususnya keputusan tentang pembiayaan atau anggaran kerja sama. Program kerja sama dapat dibatalkan oleh mereka, bila mereka tidak dilibatkan sejak awal. (3) libatkan pegawai pelaksana. Pegawai yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menanganinya harus dilibatkan sejak awal karena merekalah yang akan menangani dan menjaga kelangsungan kerjasama itu. Sikap, kepentingan dan bahkan persepsi mereka tentang kerjasama harus diperhatikan dan dijaga dukungannya.

---

²¹ Warsono. 2008. *Kontribusi Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia*. http://infobaa.umm.ac.id/files/file/Artikel_Koran/Kontribusi_pasar_modal_terhadap-perekonomian_indonesia.pdf, diakses 2 April 2015

- b. Senantiasa menjaga semangat kerjasama (maintain a cooperative spirit). Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap yang selalu provokatif, fleksibel, dan sabar, serta selalu berfikir dalam konteks regional yang luas dan tidak sempit pada daerahnya sendiri. Semangat kerjasama ini harus diturunkan dari generasi ke generasi agar kepentingan bersama tingkat regional tetap dibela dan terpelihara.
- c. Bekerja dengan hati-hati (proceed with care) karena melibatkan berbagai pihak dari daerah lain dalam suatu kerjasama maka setiap langkah kegiatan yang diambil harus dengan hati-hati seperti melakukan studi atau penelitian lapangan, memilih program yang realistis, memberi perintah sampai secara rinci, menjaga hubungan yang tidak sehat seperti memupuk hubungan tidak formal secara berlebihan sehingga membuat kerjasama menjadi tidak terkontrol dan tidak efektif.
- d. Alokasikan biaya secara adil (allocated costs fairly) kerjasama itu sendiri memang bebas biaya, tetapi program kerjasama membawa implikasi biaya, bahkan tidak sedikit. Tetapi karena dipikul bersama, maka mestinya biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang ditanggung sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah. Kalau hal ini tidak terjadi, rasa keadilan mulai terusik, dan resistansi terhadap kerjasama akan muncul. Prinsip *win-win solution* harus dipegang dipegang teguh untuk menyelenggarakan kerjasama ini. Masing-masing daerah harus mengambil manfaat dengan mengorbankan daerah yang lain. Tentu resiko harus ditanggung bersama apabila terjadi kegagalan.

- e. Tangani persoalan yang dihadapi secara serius. Memang program kerjasama bersifat sukarela tetapi tidak berarti tidak perlu serius menangani program tersebut. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari program tersebut. Karena itu harus dirumuskan bidang-bidang tanggung jawab setiap pihak secara jelas agar masing-masing tidak merasa terusik tanggung jawabnya dan secara serius menangani persoalan yang dihadapi dalam program kerjasama.

Dengan demikian kerjasama bukanlah sesuatu yang mudah atau datang begitu saja dan dapat bekerja secara otomatis dengan sendirinya. Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa aktor untuk melakukan penyesuaian dan perubahan, agar bisa memperoleh hasil yang optimal. Apa yang penting dalam kerjasama adalah perlunya tindakan bersama yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama. Pratikno, menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kerjasama agar dapat dilakukan secara efektif. Guna menjamin berlangsungnya suatu kerjasama maka:²²

- a. Harus ada hasil yang lebih besar yang diperoleh melalui kerjasama.
- b. Masing-masing pihak harus belajar memiliki visi dan tujuan yang sama.
- c. harus ada pihak yang rela menjadi inisiator kerjasama.
- d. Harus tersedia jaringan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya.
- e. Harus terdapat pengaturan yang fair mengenai kontribusi masing-masing pihak.

---

²² Pratikno. *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Yogyakarta: JIP Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2007. hlm: 94

Kerjasama hanya akan berhasil apabila hasil yang diharapkan oleh para pihak atau yang disebut oleh Pratikno sebagai *expected gain* dari kerjasama. Harapan yang akan diperoleh tersebut selayaknya lebih berharga dari pada hasil yang diperoleh jika para pihak bekerja secara sendirian. Namun yang harus diperhatikan adalah *expected gains* merupakan sesuatu yang relatif. *Expected gains* tersebut akan sangat tergantung pada paradigma berfikir yang dianut atau visi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan kerja sama.²³ Oleh karena itu jika pihak-pihak yang bekerjasama telah memiliki visi yang sama tentang kerjasama, maka gains yang mereka harapkan akan diperoleh juga akan sama, atau paling tidak selaras. Dengan demikian secara rasional pun akan mudah untuk mengajak bekerja sama. Di sini kepentingan masing-masing pihak perlu mendapatkan perhatian lebih karena kepentingan inilah yang akan menjadi dasar yang menuntun kerjasama dilakukan dengan tanpa adanya tekanan.

Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan jika para pelaku kerjasama memiliki pemahaman dan visi yang sama tentang tujuan mereka dalam jangka panjang. Pemahaman mengenai tujuan jangka panjang ini menjadi bagian yang cukup penting karena tidak jarang pihak-pihak yang bekerjasama kemudian lebih terpicat dalam kepentingan-kepentingan sesaat atau kepentingan-kepentingan jangka pendek yang kemudian mengganggu jalannya kerjasama dalam jangka panjang. Dengan demikian menurut Pratikno perlu pula dilakukan semacam pemetaan mengenai apa yang akan dicapai dalam jangka panjang, siapa saja yang terlibat dan manfaat apa yang diperoleh para pihak, serta bagaimana pelaksanaan

---

²³ Ibid: 92

kerjasama yang akan dilakukan. Melalui kesepakatan akan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak maka akan dapat digambarkan manfaat yang diperoleh serta kontribusi apa yang mesti disumbangkan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama.²⁴

Dalam kerjasama juga seringkali dibutuhkan adanya satu pihak yang mengajukan inisiatif untuk bekerjasama. Apabila usulan kerjasama dimaksud ditanggapi oleh para pihak yang dianggap terkait kepentingannya dalam kerjasama maka barulah terjadi suatu proses negosiasi dalam mewujudkan kerjasama. Keberadaan inisiator kerjasama ini menurut Pratikno (2007:93) cukup penting karena tidak jarang keberhasilan atau kegagalan dari suatu kerjasama ditentukan oleh keberhasilan atau performainisiator. Hal lainnya yang diperlukan dalam menjamin keberhasilan kerjasama ialah adanya jaringan yang menghubungkan para pihak yang menjalin kerjasama. Karena masing-masing pihak memiliki kemampuan dan sumberdaya yang tidak selalu sama maka diperlukan sebuah jaringan yang mampu merangkai berbagai kepentingan yang ada di dalamnya untuk menjadikannya sebagai modal dalam bekerjasama.²⁵

Terakhir, kebutuhan yang juga terdapat dalam kerjasama agar dapat berlangsung baik adalah adanya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang disepakati di antara pihak-pihak sebagai bagian dari upaya mencegah gagalnya jalinan kerjasama apabila terdapat hal-hal yang terjadi serta kurang sesuai dengan apa yang diharapkan semula.

---

²⁴ Ibid: 92

²⁵ Ibid: 93

2. Konsep Kerjasama

Secara teoritik istilah kerjasama telah cukup lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber dari efisiensi dan kualitas pelayanan. Sifat kerjasama seringkali ditafsirkan sebagai bersifat sukarela, tetapi bukan semauanya, karena kerjasama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh para pihak yang bekerjasama. Kerjasama juga telah dikenal sebagai cara yang tepat untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (economic scales). Dalam literatur disebutkan bahwa kerjasama memiliki derajat yang berbeda. Mulai dari koordinasi dan kooperasi, sampai kepada derajat yang paling tinggi yaitu *collaboration* atau kolaborasi.²⁶

Karena itu menurut Keban, para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan di antara istilah kerjasama tadi terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas. Secara umum dalam bahasa Indonesia ketiga jenis hal tadi masih sering dipergunakan secara bergantian, dan belum memperlihatkan kedalamannya, dimana *cooperation* terletak pada tingkatan terendah dan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi. Dan secara umum di Indonesia masih dikenal istilah kerjasama dari pada kolaborasi.²⁷

Kerjasama dibutuhkan karena adanya keterbatasan masing-masing organisasi atau instansi yang secara formal memang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

---

²⁶ Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng. *Corporate Governance Concept And Model (Preserving True Organization Welfare)*, Center For Good Corporate Governance Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, 2009. hlm: 113

²⁷ Yeremias T Keban, *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2007, hlm: 26

melekat pada suatu organisasi. Akan tetapi beberapa persoalan yang berkembang dalam suatu wilayah atau daerah terkadang memerlukan kerjasama antar organisasi karena adanya lintas kepentingan apakah dalam bentuk lokasi suatu kawasan atau masyarakat yang menjadi lokus dan fokus dari organisasi pemerintah.

F. Konsep syirkah (kerja sama/partnership) dalam KHES

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il mādhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhāri'*), dan *mashdar* (kata dasar)nya ada tiga *wazn* (timbangan), boleh dibaca dengan salah satunya, yaitu: *syirkatan* / *syarikatan* / *syarakatan*; artinya persekutuan atau perserikatan. Dan dapat diartikan pula dengan percampuran, sebagaimana firman Allah dalam surat Shaad, ayat 24. Akan tetapi, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, dibaca *syirkah* lebih fasih.²⁸

Adapun menurut istilah para ulama fikih, *syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Secara istilah menurut para ahli *syirkah* yaitu:.

1. Maliki, *syirkah* ialah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka.
2. Syafi'i dan Hambali *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

²⁸ *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, III/58

²⁹ *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusydi II/253

3. Hanafi syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan..³⁰

Menurut KHES buku II Bab I Pasal 20 Ayat III, Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Syirkah al-tijarah (kerja sama dalam perdagangan) yaitu percampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerja sama dagang dengan syarat dan rukun tertentu, yang dalam hukum perdata disebut dengan perserikatan dagang. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat dan berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang disepakati.³¹

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bekerja sama, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

---

³⁰ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010) h. 167

³¹ Elimartati, *Hukum Perdata Islam ....*, h. 167

. Setiap orang dari mereka mendapat untung seukuran harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta perserikatan. Jika terjadi saling ridha untuk membagi untung sama rata walaupun jumlah harta yang dikeluarkan berbeda-beda, maka hal tersebut boleh, walaupun harta (yang dikeluarkan) oleh salah seorang dari mereka sedikit dan yang lain lebih banyak. Dan dalam hal yang seperti ini tidak mengapa menurut syariat, karena ia merupakan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling ridha dan kerelaan hati.

Syirkah sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Syirkah amlak dan Syirkah uqud. Sedangkan menurut beberapa madzhab ada beberapa bagian, menurut madzhab Hanafiah ada 4 (inan, wujuh, mudharabah, dan abdan), madzhab Malikiyah ada 2 (inan, abdan, dan mudharabah), madzhab Syafiiyah ada 2 (inan dan mudharabah). Tetapi dalam sebuah kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* karangan Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa jenis syirkah itu ada 5 (inan, abdan, wujuh, mudharabah, dan muwafadhah).³²

1. Syirkah Inan

Yaitu kerjasama antara kedua belah pihak yang kedua belah pihak tersebut sama-sama memberi modal dan jasa.

2. Syirkah Abdan

Yaitu kerjasama antara kedua belah pihak yang kedua belah pihak tersebut sama-sama memberi jasa dan hanya satu yang memberi modal, dalam hal

---

³² Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam Cetakan IV*, (Beirut: Darrul Ummah, 1990), hal. 58.

syirkah ini dititik beratkan ditenaga atau keahliannya. Contoh kerjasama antara BOS mebel dengan tukang kayu.

3. Syirkah Wujud

Yaitu kerjasama antara beberapa pihak yang kedua belah pihak tersebut sama-sama memberi dan pihak ketiga memberi modal. Contoh A dan B memberikan kontribusi kerja kepada C yang memberi modal, A dan B disini maksudnya adalah tokoh masyarakat.

4. Syirkah Mudharabah

Yaitu kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pemilik modal menyerahkan sebuah modal kepada pengelola untuk dikelola dan diusahakan, dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan.

5. Syirkah Muwafadhah

Yaitu gabungan dari kerjasama mulai dari Syirkah Inan, Abdan, Wujud, dan Mudharabah.